

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
(SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) KOTA METRO**

(Skripsi)

Oleh

Bunga Liza Maharani

NPM 2156041035



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA METRO

OLEH

BUNGA LIZA MAHARANI

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan merupakan teknologi yang diterapkan dari kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah yaitu Permendagri No. 77 tahun 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerahnya guna mencapai akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam laporan keuangannya. Kesalahan input data, gangguan koneksi internet serta *maintenance* aplikasi merupakan permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi Charles O. Jones. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIMDA Keuangan sudah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Namun kendala-kendala yang ada masih turut mempengaruhi efektivitas implementasi. Dengan demikian, dalam memaksimalkan manfaat SIMDA Keuangan, diperlukan evaluasi kebijakan secara berkala dan perbaikan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

Kata Kunci: Implementasi, SIMDA Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMDA) FINANCE AT THE METRO CITY FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY (BPKAD)

By

BUNGA LIZA MAHARANI

The Regional Management Information System (SIMDA) Finance is a technology implemented from financial management policies based on Government Regulations, namely Permendagri No. 77 of 2020 by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) which aims to assist local governments in managing finances in their regions in order to achieve accountability, transparency and efficiency in their financial reports. Data input errors, internet connection interruptions and application maintenance are the problems. This study aims to determine the implementation of SIMDA Finance at BPKAD Metro City. This research uses a descriptive qualitative method with Charles O. Jones implementation theory. The results showed that the SIMDA Finance application has been running quite effectively in supporting regional financial management. However, the existing constraints still affect the effectiveness of implementation. Thus, in maximizing the benefits of SIMDA Keuangan, periodic policy evaluations and infrastructure improvements that support the implementation of this policy are needed.

Keywords: Implementation, SIMDA Finance, Regional Financial Management

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
(SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) KOTA METRO**

Oleh

BUNGA LIZA MAHARANI

Skripsi

Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Bunga Liza Maharani**

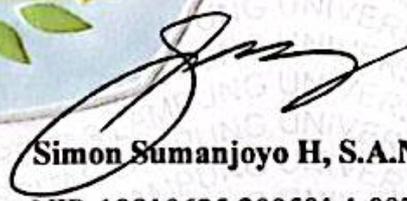
Nomor Pokok Mahasiswa : **2156041035**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

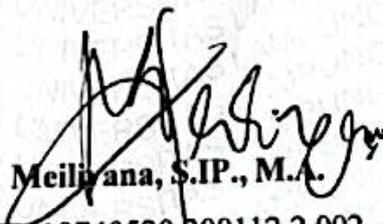
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Nana Mulyana, S.IP., M.SI.
NIP. 19710615 200501 1 003


Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.
NIP. 19810625 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.

Penguji Utama: Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Bunga Liza Maharani
NPM. 2156041035

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bunga Liza Maharani dilahirkan di Metro pada tanggal 16 Februari 2003, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Hendriyana dan Ibu Made Lestari. Penulis mempunyai kakak laki-laki yang bernama M. Reksa Fathury.

Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Perwanida Kota Metro pada tahun 2008-2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Metro Pusat pada tahun 2009-2015. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Metro pada tahun 2015-2018 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Metro pada tahun 2018-2021.

Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) 2021 di bidang Data dan Informasi (DAIN).

Pada bulan Januari hingga Februari 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pada bulan Februari hingga Agustus 2024 penulis mengikuti, program MBKM yaitu Magang Mandiri di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro sebagai bentuk pengembangan diri serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

MOTTO

“Hanya kepada Allah aku mengadakan kesusahan dan kesedihanku.”

(QS. Yusuf: 86)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar Rum: 60)

“Pada akhirnya ini semua hanya permulaan”

(Nadin Amizah)

“Hidup yang kita jalani adalah milik kita, dan kitalah yang dapat mengendalikan hidup kita sendiri. Bukan orang lain.”

(Baekhyun EXO)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan ridha-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Bapak dan Mamak

Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mamak dan Bapak atas segala pengorbanan, doa, dukungan dan waktu yang selalu diberikan kepada penulis. Karya ini kupersembahkan kepada kalian yang senantiasa mendukung di setiap langkahku dalam menggapai cita-cita.

Dosen Pembimbing dan Pembahas

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sahabat-Sahabatku

Terimakasih telah memberikan dukungan, doa serta meluangkan waktu untuk sekedar memberikan canda tawa untuk menemani penulis dalam setiap proses.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro”. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, saran, serta do’a dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.SI. selaku Dosen Pembimbing 1 atas kesabaran dan kesediaannya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini serta selalu meluangkan waktunya untuk bimbingan.
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan saran serta arahan kepada penulis dan selalu meluangkan waktunya untuk bimbingan.
3. Miss Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembahas skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
4. Bapak Prof. Noverman Duadji, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuannya dalam masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang

selalu mengingatkan dan menyemangati kami untuk tidak lupa mengerjakan skripsi, terima kasih ibu atas dorongan dan semangatnya.

7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa, Semoga ilmu bermanfaat yang telah diberikan dapat menjadi sebuah ladang pahala yang terus mengalir seumur hidup Bapak dan Ibu.
8. Seluruh Staf Ilmu Administrasi Negara terutama Mba Wulan dan Mba Uki, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai keperluan administrasi dari awal mahasiswa baru hingga saya lulus.
9. Teruntuk, Mamak. Terima kasih sudah berjuang untukku sampai mendapat gelar ini, atas doa-doa, jerih payah yang telah dilakukan untukku selama ini serta kasih sayangmu untukku. Hiduplah lebih lama sampai aku bisa membalas semua usaha dan membahagiakan Mamak.
10. Teruntuk, Bapak. Terima kasih untuk perjuangannya selama ini untukku, atas doa-doa yang telah engkau panjatkan setiap harinya, aku akan selalu menjadi anak perempuan kecilnya Bapak. Hiduplah lebih lama lagi sampai aku bisa membalas semua usaha Bapak dan bisa membanggakanmu.
11. Terima kasih untuk Kakak Reksa yang selalu memberi doa, materi, serta dukungan untukku selama ini. Ku persembahkan gelarku juga untukmu. Aku akan selalu mendukungmu dan sukseslah, Kak.
12. Teruntuk Dipani dan Minji, terima kasih selalu membantu, menolongku, dan selalu membersamaiku dalam menempuh pendidikan ini. Terima kasih selalu ada dalam mendengar semua keluh kesahku selama ini. Terima kasih turut membersamaiku dan mau selalu direpotkan.
13. Teruntuk Cika dan Tri, terima kasih selalu mendukungku sampai sekarang dan selalu menjadi bagian dalam perjalanan hidupku ini. Walaupun jauh nantinya, aku harap kita bisa lebih lama.
14. Sahabat-sahabat Uri Chingu, Lisel, Tata, Inej, dan Fitri yang selalu menemani selama perkuliahan dan saling menguatkan dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah mau mendengar semua ucapan anehku, keluh kesahku, dan selalu membersamai dalam hal apapun. Sukses selalu untuk Uri Chingu, kedepannya aku harap tidak ada kata asing.

15. Teman-teman masa SMA, Ayu, Ike, Pina, dan lainnya yang tidak bisa disebut, terima kasih masih atas dukungan kalian selama ini.
16. Teman-teman perjuangan Skripsi, Acan, Anggi, Vania, Nadhila dan lainnya yang tidak bisa disebut. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai, semoga kalian sukses dan bahagia selalu.
17. Teman-teman kelas Reg M yaitu Berta, Prames, Wisbel, Destira, Elsa dan masih banyak lagi yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, dan Himagara 2021, terima kasih atas kebersamaannya.
18. Teruntuk IVE, Aristi, Sonya, Putri, dan Yuke. Terima kasih selalu menemani sejak awal masa perkuliahan dan saling menguatkan. Meskipun sudah berbeda, aku harap kalian sukses dan bahagia di jalan kalian masing-masing.
19. Teman-teman KKN, Susan, Annisa, Uci, Wildan, Jalu, Dimas. Terima kasih atas kebersamaannya selama KKN.
20. Kepada seluruh pegawai BPKAD Kota Metro yang telah membantu dan memberikan pengalaman yang berkesan selama magang dan menulis skripsi.
21. Seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Terima kasih kepada EXO, sudah menemani dari lagu-lagu kalian selama pengerjaan skripsi. Terima kasih kepada *korean actor* lain yang menemani melalui karya-karya nya dalam pengerjaan skripsi.
23. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang meski banyak kesedihan yang ada dan melalui nya sendiri. Terima kasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar dan tak pernah memutuskan untuk menyerah meskipun sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan dapat menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Aku harap cita-cita yang selalu diimpikan secepatnya dapat terwujud.

Semoga kebaikan yang diberikan oleh kalian kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar, dan yang terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun.

Bandar Lampung, 04 Juni 2025

Penulis,

Bunga Liza Maharani

NPM. 2156041035

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	10
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan	12
2.2.3 Good Governance	17
2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	21
2.2.4 Pengertian Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan	24
2.3 Kerangka Pemikiran	27
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Tipe Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian	23
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Jenis dan Sumber Data	24
3.4.1 Jenis Data	24
3.4.2 Sumber Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Metode Analisis Data	27

3.7 Teknik Keabsahan Data	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro ..	30
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kota Metro.....	31
4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro	32
4.1.4 Struktur Organisasi	32
4.1.5 Peta Jabatan dan Sumber Daya Manusia.....	33
4.2 Gambaran Umum SIMDA.....	34
4.2.1 Tujuan Pengembangan Aplikasi SIMDA	35
4.2.3 Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan.....	36
4.3 Hasil Penelitian.....	38
4.3.1 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada BPKAD Kota Metro	38
4.3.2 Faktor Penghambat Implementasi SIMDA Keuangan	55
4.4 Pembahasan	57
4.4.1 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada BPKAD Kota Metro	57
4.4.2 Faktor Penghambat Implementasi SIMDA Keuangan	67
V. KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Pengembangan Aplikasi SIMDA	4
Tabel 2. Pengguna SIMDA Keuangan di Kota Metro	4
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4. Wawancara Informan.....	25
Tabel 5. Gambaran Objek yang Diamati	26
Tabel 6. Analisis Teori & Temuan Lapang	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	28
Gambar 2 Tampilan Aplikasi SIMDA Keuangan	39
Gambar 3: Sosialisasi Pelatihan	44

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
EDP	<i>Electronic Data Proccesing</i>
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PA	Pengguna Anggaran
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
SIMDA	Sistem Inforamsi Manajemen Daerah
SIMDA BMD	Sistem Inforamsi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah
SIMDA CSM	Sistem Inforamsi Manajemen Daerah <i>Cash System Management</i>
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPD	Surat Penyediaan Dana
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	Surat Perintah Membayar
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari administrasi negara, khususnya dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Administrasi negara berfokus pada cara pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi publik secara efisien dan efektif, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam mengelola anggaran, yang sekaligus menjadi tantangan besar untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Pemerintah menetapkan sebuah peraturan tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 perihal mengenai tata cara kelola keuangan daerah. Peraturan ini dibuat oleh Menteri Dalam Negeri agar dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan oleh pemerintah dalam hal mengelola keuangan terutama lingkup daerah. Dengan ini, pemerintah hanya perlu menjalankan pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing sesuai dengan Permendagri yang telah dibuat.

Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) perlu menyusun pertanggungjawaban mengenai laporan pengelola keuangan dengan menggunakan sistem informasi. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan keuangan di daerahnya. Terlebih pada era globalisasi saat ini, instansi pemerintah daerah dituntut agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam meningkatkan kinerja pegawai, khususnya dalam laporan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi yang ada agar dapat mempermudah dalam proses pengelolaan data keuangan. Untuk melakukan pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien, maka diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang bisa diandalkan, cepat, dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara keseluruhan dan bisa memberikan data yang relevan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan total *value* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Peningkatan volume ini tentunya harus disertakan dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan di pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah memegang peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan anggaran, tetapi hal ini juga menuntut peningkatan kapasitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah proses pengelolaan keuangan yang manual, rentan terhadap kesalahan, dan kurang efisien. Oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban dalam mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan di daerahnya sendiri.

Sebagai bentuk dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tahun 2007 ditetapkan suatu aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi yang membantu pemerintahan daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dirancang untuk mendukung proses administrasi keuangan daerah yang berbasis teknologi. Dalam konteks ilmu administrasi negara, SIMDA Keuangan tidak hanya berperan sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mengintegrasikan proses administrasi dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi publik (BPKP, 2023).

Dengan adanya prinsip *good governance* yaitu transparansi, pengelolaan keuangan yang ada diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui aplikasi ini, informasi keuangan dapat diakses secara lebih mudah dan *real time* oleh pihak-pihak terkait, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya pada instansi BPKAD Kota Metro. Transparansi merupakan prinsip utama, oleh karena itu tanpa adanya prinsip ini prinsip-prinsip lainnya tidak dapat dipenuhi atau dijalankan.

Begitu pula dengan prinsip akuntabilitas dalam *good governance*, yaitu prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu meningkatkan pertanggungjawaban atas setiap penggunaan anggaran daerah. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan, pelaporan, dan pengawasan yang lebih terstruktur, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitasnya serta integritas kinerja dalam mengelola keuangan daerah.

Aplikasi SIMDA yang dikembangkan BPKP merupakan salah satu produk keluaran dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh sebagian pemerintahan di Indonesia dalam penyelenggaraan laporan keuangan di daerahnya, daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan karena memperhatikan pengimplementasi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemerintah daerah diharuskan bisa menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mempunyai nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi ini diperlukan sarana dan prasarana yang baik dan dibantu dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang ada pada pemerintahan daerah.

Melalui situs resmi BPKP, terdapat penjelasan bahwa aplikasi SIMDA Keuangan dirancang untuk mewujudkan keuangan negara yang berkualitas dalam transformasi manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik juga bersih. Hal ini cukup penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah agar dapat terwujudnya *good governance*.

Dalam situs ini pula dijelaskan bahwa hasil pengembangan produk aplikasi SIMDA terdapat beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Pengembangan Aplikasi SIMDA

No.	Pengembangan Produk SIMDA
1.	Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2.	Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3.	Program Aplikasi SIMDA Gaji
4.	Program Aplikasi SIMDA Pendapatan
5.	Sub Aplikasi Display SPP s.d. SP2D
6.	Sub Aplikasi Gabungan per Prov.
7.	Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank

Sumber: simda-online.id (dikelola oleh BPKP), 2019

Program aplikasi SIMDA Keuangan merupakan program yang ditunjukkan untuk membantu pemerintah-pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Melalui aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara integrasi, dimulai dari penganggaran, pernatausahaan, sampai dengan akuntansi juga pelaporannya. Ini sangat menarik jika dapat diketahui bagaimana implementasi mengenai penggunaan SIMDA Keuangan.

Sampai dengan saat ini, program aplikasi SIMDA Keuangan telah diimplementasikan pada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Metro, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengguna SIMDA Keuangan di Kota Metro

No.	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	Status
1.	Dinas Kesehatan	Pengguna
2.	Dinas komunikasi dan informatika	Pengguna
3.	BPPRD	Pengguna
4.	Sekretariat daerah	Pengguna
5.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna
6.	Sekretariat DPRD	Pengguna
7.	Dinas PU & TR	Pengguna
8.	Inspektorat	Pengguna
9.	Dinas Perhubungan	Pengguna
10.	Dinas Sosial	Pengguna

11.	D. Perkim	Pengguna
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna
13.	BKPSDM	Pengguna
14.	D. Penanaman Modal & PTSP	Pengguna
15.	D. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna
16.	BPKAD	Pengguna
17.	D. Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pengguna
18.	D. Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Pengguna
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna
20.	D. Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pengguna
21.	D. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Pengguna
22.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna
23.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Pengguna
24.	Dinas Perdagangan	Pengguna
25.	DISNAKERTRANS	Pengguna
26.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Pengguna
27.	Satuan Polisi PP	Pengguna
28.	Kec. Metro Pusat	Pengguna
29.	Kec. Metro Timur	Pengguna
30.	Kec. Metro Barat	Pengguna
31.	Kec. Metro Utara	Pengguna
32.	Kec. Metro Selatan	Pengguna

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Dapat dilihat pada Tabel 2. bahwa pengguna aplikasi SIMDA Keuangan di Kota Metro menunjukkan bahwa terdapat 32 SKPD yang sudah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Salah satu pemerintahan daerah yang mengimplementasikan SIMDA keuangan adalah instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.

Melalui adanya teknologi sistem yang berbasis aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah para pegawai pemerintahan dalam pengelolaan laporan keuangan pada BPKAD di Kota Metro. Tetapi, implementasi SIMDA Keuangan di berbagai daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan ini meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan dari proses manual ke digital (Astuti, 2021). Faktor-faktor ini sering menjadi

penghambat dalam optimalisasi sistem yang dirancang untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Melihat beberapa permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Metro?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Metro?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Metro.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Metro.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dalam hal tata kelola (*good governance*), kebijakan publik dan sistem informasi manajemen sektor publik di instansi-instansi pemerintahan terutama pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) khususnya para staff juga pegawai BPKAD agar mengetahui Implementasi SIMDA Keuangan pada kantor BPKAD Kota Metro.

Penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat praktis berupa bahan rujukan bagi mahasiswa lain dan masukan bagi pihak akademis dalam membuat penelitian tentang tata kelola organisasi publik dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di era global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan. Selain itu, bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterkaitan dan Perbedaan
1.	Kurnia Hardjanto, Margaretha Kusuma P, Murjoko (2019)	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Berbasis Akrual pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara teknis aplikasi SIMDA tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Aplikasi SIMDA Keuangan dilakukan secara <i>online-real time</i> yang terhubung ke <i>server</i> BPKAD Kota Magelang. Jaringan yang ada menggunakan internet LAN atau untuk yang di luar jangkauan dengan diberikan IP khusus. Hal ini menjadi kelemahan apabila jaringan mengalami <i>trouble</i> yang mengakibatkan tidak dapat melakukan input data. Selain itu, karena penggunaan yang banyak membuat aplikasi ini sering mengakibatkan <i>overload</i> dan menjadikan akses SIMDA menjadi lambat. Aplikasi juga terkadang <i>error</i> , masih ditemukannya <i>bugs</i> yang bersifat <i>temporer</i> , <i>trouble</i> di <i>software</i> aplikasi atau disistem operasi komputer.	Keterkaitan dengan penelitian ini adalah membahas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Sedangkan, perbedaannya ada pada jenis penelitian, metode penelitian (survey responden dengan menggunakan kuesioner) dan tempat (<i>locus</i>) penelitian.
2.	Rizki Alhamdi (2019)	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Studi Laporan Keuangan pada	Adapun hasil dari penelitian ini adalah penerapan atau implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Pelalawan	Keterkaitan dengan penelitian ini adalah membahas

		Kantor Camat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	dimulai sejak tahun 2015 sampai 2019 (berjalan). Penerapan SIMDA Keuangan sudah pasti berhubungan langsung dengan keadaan atau kondisi sebelumnya yang menjadi faktor pendukung jalannya suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor pendukung yang dimiliki antara lain, komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Adapun hambatan yang didapat yaitu diketahui dalam pengoperasian SIMDA sering kali aplikasi ini terputus dengan jaringan internet.	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Sedangkan, perbedaannya ada pada teori yang digunakan dan <i>locus</i> (lokasi) penelitian.
3.	Nafischa Erning Nabilah (2021)	Analisis Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	Adapun hasil dari penelitian ini adalah SIMDA Keuangan yang diterapkan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara sudah efektif untuk mengelola keuangan daerah. Terlihat pada indikator bahwa efektivitas SIMDA yaitu, integritas, fleksibelitas, aksesibilitas, formalitas dan media. Tetapi, terdapat kendala kecil yang sering terjadi dalam mengelola keuangan disebabkan karena SIMDA tidak terintegrasi dengan aplikasi lain, SIMDA Keuangan masih kurang fleksibel dalam pengembangan programnya	Keterkaitan dengan penelitian ini adalah membahas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Sedangkan, perbedaannya ada pada teori yang digunakan dan <i>locus</i> (lokasi) penelitian
4.	Desi Mariana Br. Simamora (2021)	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi SIMDA Keuangan versi 2.7 di sub keuangan BPPRD Kota Medan sudah diterapkan sejak tahun 2016. Komunikasi yang dilakukan sudah sangat efektif, terlihat dari transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya yang ada sudah memadai. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan implementasi SIMDA Keuangan sudah baik, mereka mampu menjalankan kebijakan tersebut. Tetapi, terdapat kendala dalam pengimplementasi SIMDA Keuangan versi 2.7 yaitu pada	Keterkaitan dengan penelitian ini adalah membahas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Sedangkan, perbedaannya ada pada teori yang digunakan dan <i>locus</i> (lokasi) penelitian.

gangguan jaringan internet, sehingga mengganggu pada saat proses input data. Jika gangguan internet terjadi, pihak sub keuangan BPPRD Kota Medan menghubungi Dinas Kominfo selaku penyelenggara jaringan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan kegiatan atau suatu tindakan berdasarkan sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan jika seluruh perencanaan telah dianggap sempurna. Pemahaman akan suatu implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan dapat terlihat manfaatnya apabila telah dilakukakn implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan suatu hal yang penting dalam keseluruhan proses perencanaan.

Implementasi menurut teori Jones adalah: *“Those activities directed toward putting a program into effect”* artinya, proses mewujudkan suatu program hingga memperlihatkan hasilnya. Jadi, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi adalah suatu cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi pengaruh baik yang berupa perubahan pengetahuan, keterampilan ataupun nilai juga sikap (Mulyasa, 2010:173).

Grindle (1980:7) mengatakan bahwa implemenatasi adalah suatu proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dapat dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Menurut pandangan Van Meter & Horn dikutip dari Parsons (1995:461) dan Wibawa dkk (1994:15) bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan organisasi

pemerintah juga swasta, baik secara individu ataupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Waluyo, (2007:49), bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting, Keputusan ini mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam berbagai cara atau proses implementasinya.

Menurut Meter dan Horn dalam Naditya, dkk (2013:1088), menjelaskan implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diberi arahan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu dalam rangka melanjutkan upaya-upaya mencapai perubahan yang sudah ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Pelaksanaan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan suatu kebijakan atau program sistem informasi manajemen. Pelaksanaan ini dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan, baik oleh individu ataupun kelompok pemerintahan, yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan.

Berdasarkan dari berbagai pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa pengertian dari implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan program-program sistem informasi dan kebijakan yang akan diterapkan di suatu organisasi atau institusi, terlebih dengan institusi negara dan menyertakan dana serta sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan nantinya.

Implementasi juga merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Pada umumnya, jika membicarakan atau mendengar tentang sistem informasi manajemen yang sudah tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan guna melaksanakan pengolahan data yang nantinya akan

dimanfaatkan oleh suatu organisasi, baik organisasi publik ataupun swasta.

Implementasi artinya untuk melaksanakan. Sederhananya implementasi dapat dikatakan juga sebagai pelaksana atau penerapan. Penerapan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi sudah ada sebelum adanya perangkat komputer, yang pada intinya sistem informasi manajemen konvensional merupakan pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, arsip, komunikasi antar pegawai dengan atasan dalam suatu organisasi, penyajian informasi dalam pengambilan keputusan.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Dalam kajian ilmu kebijakan publik terdapat banyak teori-teori yang telah dikembangkan mengenai model implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat diterapkan secara efektif. Melalui model ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi.

1. Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Model Charles O. Jones dalam (Marwiyah, 2022) mengemukakan mengenai implementasi merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang mengerjakan sebuah program dimaksudkan guna menimbulkan akibat tertentu, di mana implementasi program atau sistem terdiri dari tiga aktivitas atau kegiatan utama yang sangat penting, yaitu, *organization*, *interpretation*, dan *application*. Menurut O. Jones dalam implementasi kebijakan terdapat tiga kegiatan yang utama sebagai berikut.

a. Organisasi (*Organization*)

Pengorganisasian menurut Jones adalah pelaksana kebijakan yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya yang ada, unit kegiatan, dan metode yang dijadikan program berjalan. Artinya, dalam mencapai tujuan implementasi sistem informasi

manajemen atau program, pemerintah harus melakukan suatu tindakan yang merupakan himpunan juga pengelolaan sumber daya yang sudah dimiliki melalui metode yang sudah ditentukan dan dapat dilihat dalam pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi yang ada dan mengarah pada tujuan atau sasaran. Struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan dalam hal ini. Organisasi dalam konteks implementasi merupakan kegiatan yang membentuk badan, unit, dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang ada di dalam kebijakan. Organisasi merupakan suatu sekumpulan orang-orang yang menjalankan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi.

b. Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi para pelaksana suatu program atau sistem merupakan kegiatan pelaksana suatu kebijakan yang berupa sistem informasi manajemen dimaksudkan agar program dapat menjadi rencana atau pengarah yang tepat dan bisa diterima lalu dilaksanakan dengan baik. Interpretasi sangat berkaitan dengan implementasi dalam memahami apa yang harus dikerjakan sesuai dengan yang diharuskan. Proses ini sangat bergantung pada komunikasi antar kata atau makna (penafsiran). Interpretasi dari para pelaksana program sistem informasi manajemen harus mengetahui bagaimana substansi program, makna, serta tujuan dari program sistem atau kebijakan dengan baik juga agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan yang ada.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi atau penerapan dari pelaksana program sistem kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau jenis lainnya disesuaikan dengan tujuan serta keperluan atau perlengkapan program dari kebijakan sistem informasi manajemen itu sendiri yang telah ditetapkan sebelumnya. Aplikasi suatu kebijakan program merupakan suatu faktor yang menentukan

implementasi kebijakan atau program. Pelaksanaan pekerjaan ini meliputi penyedia atau persediaan terhadap tujuan program dan juga perangkatnya. Implementasi program yang akan dilakukan dengan pengarahannya sumber daya melalui aplikasi ini diharapkan mampu memunculkan respon dari suatu kelompok dalam menerima atau menolak hasil tersebut.

2. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter & Carl Van Horn

Dalam model teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Marwiyah, 2022) ini mengatakan bahwa implementasi kebijakan ini terdapat 6 variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

- a. Standar sasaran kebijakan yang harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisasi.
- b. Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik pelaksana, mencakup birokrasi, norma, pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Lalu semuanya akan mempengaruhi implementasi dari suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonominya yaitu variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementator adalah mencakup respon implementator yang memiliki tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, insentif disposisi implementator, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

3. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Menurut George Edward III dalam (Kasmad, 2018) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *Lack of attention to implementation*. Dalam model ini memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tak langsung terhadap implementasi, sumber-sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan. Kemudian, di antara keempat faktor berpengaruh tersebut (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terjadi hubungan timbal balik.

- a. Komunikasi: Komunikasi yang tepat dengan para pelaksana kebijakan akan membantu mereka memahami tujuan dan ukuran kebijakan.
- b. Sumber daya: Sumber daya yang cukup, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, akan membantu implementasi kebijakan berjalan dengan baik.
- c. Disposisi atau sikap: Sikap implementor terhadap kebijakan akan memengaruhi efektifitas implementasi kebijakan.
- d. Struktur birokrasi: Struktur birokrasi berkaitan dengan badan pelaksana kebijakan.

Berdasarkan model implementasi kebijakan Edward di atas ini, bahwa kelebihan yang dimilikinya adalah kemampuannya menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Kelemahannya adalah tidak mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana, birokrasi pemerintahan.

4. Model Mazmanian dan Sabatier

Selanjutnya, model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), yang mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu cara melakukan keputusan kebijakan. Hal yang berbeda dengan model kebijakan top down dan model kebijakan Van Meter Van Horn, yang mana melihat keberhasilan suatu kebijakan dengan ditentukan berbagai variabel yang saling berkaitan. Mazmanian dan Sabatier (1983:71) memperkenalkan model implementasi kebijakan dengan suatu kerangka analisis implementasi (*a frame work for implementation analysis*) sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang cukup tepat dan operasional. Menurut mereka, analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kategori variabel yang dimaksudkan, yaitu:

- Variabel independen, yaitu mudah tidaknya suatu masalah yang akan digarap, yang juga berkenaan dengan indikator masalah teori dan juga teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- Variabel intervening, yaitu suatu kemampuan keputusan suatu kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat mengenai proses implementasi dengan kejelasan suatu indikator dan konsistensi tujuan dan dipergunakan teori kausal, kesesuaian alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan keterbukaan pihak luar.
- Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga-lembaga atau badan pelaksana melalui bentuk disusunnya kebijakan pelaksanaan, kepatuhan suatu objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, kemudian hasilnya mengarah pada revisi atas kebijakan

yang dibuat dan dilaksanakan keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Melihat dari teori-teori di atas yang telah diperjelas, teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones merupakan teori yang cocok karena di dalamnya sudah jelas dan luas, di mana melalui teori ini menjelaskan tentang implementasi merupakan suatu proses yang memerlukan suatu tindakan-tindakan sistematis yang meliputi organisasi, interpretasi, dan juga aplikasi atau penerapan.

2.2.3 Good Governance

Good governance merupakan suatu tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencapai suatu tujuan organisasi (Syahkroza, 2003). Meningkatnya tuntutan dari masyarakat untuk pemerintahan yang baik mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Keberhasilan suatu pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2007).

Tata pemerintahan yang baik secara umum adalah dengan cara menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini lebih dikenal dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengatur hubungan pemerintah dan masyarakat. Prinsip *good governance* membuat keseimbangan kinerja antara pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat yang dilayani. Keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola pemerintahan menjadi suatu hal yang wajib dan boleh diketahui oleh masyarakat. Menurut Joko Widodo (2001), *good governance* memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas yang bersumber dari budaya swasta, etika nilai sistem proses bisnis kebijakan, dan struktur organisasi perusahaan, yang bertujuan guna mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan pengelolaan sumber daya.

2. Seperangkat prinsip kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien, efektif, dan profitabel dalam menjalankan organisasi.
3. seperangkat prinsip kebijakan dan sistem yang mengarahkan kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (pemerintah, pemegang saham, pimpinan perusahaan, dan pegawai) dan juga bagi perusahaan itu sendiri.

Secara sederhana *good governance* merujuk pada pembangunan dan lingkungan ekonomi juga institusi yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat mengikat dan juga meningkatkan nilai jangka panjang dan memaksimalkan pengembangan SDM serta memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Tujuan *good governance* menurut Mardiasmo (2009) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif juga masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri.

Menurut Syarifin Pipin dan Dedah Juberdah (2005) berdasarkan FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2006) mengatakan bahwa tujuan dari *good governance* ini merupakan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua pihak yang berkepentingan dan juga bertujuan untuk memastikan sasaran yang dituju telah tercapai.

Lebih lanjut, UNDP merumuskan karakteristik atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang telah diikuti oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) yang meliputi:

- a. Partisipasi (*participation*)

Setiap warga negara memiliki hak serta kewajiban untuk mengambil bagian dalam berproses bernegara, berpemerintahan juga bermasyarakat, baik secara langsung ataupun intermediasi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dilakukan

warga negara tidak hanya pada tahapan implementasi, melainkan secara menyeluruh mulai dari tahapan hingga penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, hingga hasilnya.

b. Penegakan Hukum (*rule of law*)

Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa syarat yang salah satunya kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa memandang apapun. Oleh karena itu, langkah pertama dalam penciptaan *good governance* ialah dengan membangun sistem hukum yang sehat dalam perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), ataupun sumber daya manusia yang menjalankannya (*human ware*).

c. Transparansi (*transparency*)

Transparansi atau keterbukaan adalah suatu karakteristik dari *good governance* pada era revolusi informasi. Transparansi atau keterbukaan ini mencakup seluruh aspek aktivitas yang menyangkut seluruh kepentingan publik.

d. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Responsiveness atau daya tanggap merupakan suatu konsekuensi logis dari keterbukaan. Setiap komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* diperlukan memiliki daya tanggap yang baik terhadap keinginan ataupun keluhan setiap *stakeholders*.

e. *Consensus Orientations*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda yang bertujuan untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas lagi. Hal ini meliputi aspek kebijakan ataupun prosedur.

f. Keadilan

Pada dasarnya, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh suatu keadilan.

g. *Effectiveness and efficiency*

Dalam proses dan lembaga menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h. Akuntabilitas (*accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, baik berasal dari sektor swasta maupun sektor pemerintahan juga masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholder*. Akuntabilitas tergantung pada fokus organisasi apakah untuk sebuah kepentingan internal atau untuk kepentingan eksternal suatu organisasi.

i. Visi strategis

Para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas juga jauh kedepannya dan sejalan dengan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan semacam ini.

Apa yang dikemukakan oleh UNDP menekankan bahwa pemerintahan yang baik akan terwujud jika penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien, bertanggungjawab pada publik, menjaga hubungan yang seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjaga solidaritas pemerintah.

Dari sembilan prinsip-prinsip *good governance* yang telah dijelaskan, 2 prinsip terpenting adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya prinsip *good governance* yaitu transparansi, pengelolaan keuangan yang ada diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, akuntabel, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan prinsip akuntabilitas dalam *good governance*, yaitu prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu meningkatkan pertanggungjawaban atas setiap penggunaan anggaran daerah.

2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

SIMDA merupakan suatu produk dari implementasi prinsip *e-Government* yang muncul saat diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 yaitu Tentang Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang kemudian didukung oleh munculnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Informasi Manajemen ini dikembangkan untuk mempermudah kegiatan satuan kerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan satuan kerja tersebut bisa menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan juga kinerja pemerintah daerah, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Adapun tujuan dari Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini yaitu:

- a. Membantu Pemerintah Daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk dalam pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.
- b. Aplikasi SIMDA dikembangkan bersifat berbagi pakai atau dapat digunakan seluruh Pemerintah Daerah sehingga Pemda setempat tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi.
- c. Menyediakan *database* terkait kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, asset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan public yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.

- d. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat juga akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil Keputusan seluruh pemangku kepentingan.
- e. Mempersiapkan aparat daerah dalam mencapai Tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- f. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
- g. Sebagai media control dalam realisasi kegiatan, mencakup capaian fisik ataupun penyerapan dana.
- h. Sebagai media awal bagi pelaksana *e-government*.
- i. Saran untuk melaksanakan *good government*.

Hingga saat ini pengembangan aplikasi SIMDA melanjutkan perancangan, pengembangan dan pemeliharaan (*maintenance*) program aplikasi yang telah ada sebagai berikut.

- a. Program Aplikasi SIMDA Keuangan. Ini merupakan aplikasi utama dari SIMDA, program aplikasi ini meliputi penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dan pelaporan.
- b. Program Aplikasi SIMDA BMD. Ini merupakan aplikasi pengelolaan barang daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.
- c. Program aplikasi Komputer SIMDA Gaji. Ini merupakan aplikasi yang akan membantu pemda untuk proses penggajian secara lebih cepat dan akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang bisa diandalkan.
- d. Program Aplikasi SIMDA Pendapatan. Ini merupakan sarana optimalisasi pajak/retribusi daerah serta agar pemda dapat menghasilkan laporan pengelolaan pendapatan dan piutang sebagai dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan.
- e. Program Aplikasi SIMDA Perencanaan. Ini merupakan aplikasi perencanaan jangka menengah (lima tahun) atau jangka pendek (tahunan) yang terintegrasi sampai terbentuknya prioritas plafon

anggaran sebagai dasar pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

- f. Program Aplikasi SIMDA Dashboard. Ini menyediakan informasi manajerial, seperti laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta rasio keuangan pemerintah daerah dan per OPD.
- g. Program Aplikasi SIMDA CMS. Ini merupakan aplikasi layanan perbankan untuk memperlancar proses pencairan SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening tujuan.

Berdasarkan dari pedoman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2008, kerangka atau unsur SIMDA terdiri dari empat struktur/unsur yaitu:

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh Masyarakat untuk mengakses situs layanan public.
- b. Portal, pelayanan public, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan public tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan informasi dokumen elektronik disejumlah instansi terkait.
- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik, dan
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana baik terbentuk perangkat keras atau lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Menurut Djaja dalam (Budiman *et al.*, 2013) aplikasi SIMDA merupakan aplikasi *database* yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan merupakan pendorong juga fasilitator dalam keberhasilan Pembangunan suatu daerah.

2.2.4 Pengertian Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Kebijakan dalam rangka pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Pemerintah Daerah telah diatur dalam PP No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai pengganti PP No.11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, maka dikeluarkannya SIMDA Keuangan yang merupakan sebuah aplikasi dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan di daerahnya. Penerapan SIMDA Keuangan berfungsi dalam perencanaan serta pelaporan kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah tersusun sebagai bentuk produk hukum pemerintah daerah yang berfungsi juga sebagai Manual Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Aplikasi SIMDA Keuangan adalah suatu program aplikasi yang dikeluarkan sejak tahun 2007 dan ditunjukkan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. (Ardianingsih et al, 2023). Aplikasi SIMDA Keuangan telah dikeluarkan oleh BPKP sejak 2007 dan perlahan mulai digunakan oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan yang dibuat dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikenal dengan aplikasi SIMDA dan merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Dalam menghasilkan laporan keuangan ini, diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data dan

menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.9 mengakomodasi Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya pada Kepmendagri 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka Simda Keuangan v2.9.0.2 dirilis untuk penganggaran dan penatausahaan keuangan Tahun Anggaran 2021. Pada Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.9.0.2 ini akan dilakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan rekening sesuai Permendagri Nomor 90/2019 ke program, kegiatan dan rekening sesuai Kepmendagri 050/2020. Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.9.0.2 akan menghapus Rancangan APBD yang sudah diposting.

Aplikasi ini sangat diharapkan oleh pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara efisien serta efektif sesuai dengan peraturan dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual dan wajar mengingat banyaknya peraturan Peundang-Undangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengembangan dari SIMDA Keuangan dilakukan melalui penyempurnaan dari beberapa versi dengan tujuan untuk memperbaiki kestabilan system yang lama serta dengan adanya perubahan kebijakan dengan aturan perundang-undangan. Manfaat dengan adanya SIMDA Keuangan antara lain, yaitu:

a. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai suatu system informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah menjalankan peraturan.

b. Kestinambungan *Maintanance*

Dengan beradanya Lokasi BPKP yang ada di seluruh ibukota provinsi, membuat pemeliharaan system dilakukan secara berkala dan optimal.

c. *Transfer of Knowledge*

Transfer data antar OPD mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah.

d. Terintegrasi

SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang telah terintegrasi, empat tahapan penyelenggara keuangan daerah, yaitu: penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

e. Pembiayaan Penerapan SIMDA

Biaya yang dikenakan terhadap aplikasi ini dikatakan gratis atau tanpa biaya. Ini yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama bagi pemerintah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis system informasi keuangannya. Biaya yang dikeluarkan dalam penerapan SIMDA hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses pelatihannya saja yang nantinya juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri.

f. Mudah Digunakan

Fitur yang ada pada aplikasi ini sederhana dan mudah dimengerti atau dipelajari. Melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari menggunakan aplikasi ini (seperti, SPM, SPD, SP2D dan SPP) secara otomatis catatan serta laporan keuangan dapat dihasilkan (*output*) catatan akuntansi seperti jurnal, buku besar dan laporan.

Sistem aplikasi SIMDA Keuangan memiliki manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah terintegrasi (BPKP, 2008), yang didalamnya meliputi pengendalian, efisien, cepat serta akurat dalam menghasilkan informasi atau data keuangan. Selain manfaat yang ada terdapat beberapa fungsi utama juga dalam aplikasi SIMDA Keuangan. Fungsi utama dari aplikasi SIMDA Keuangan ini adalah sebagai berikut.

- a. Membantu pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban).

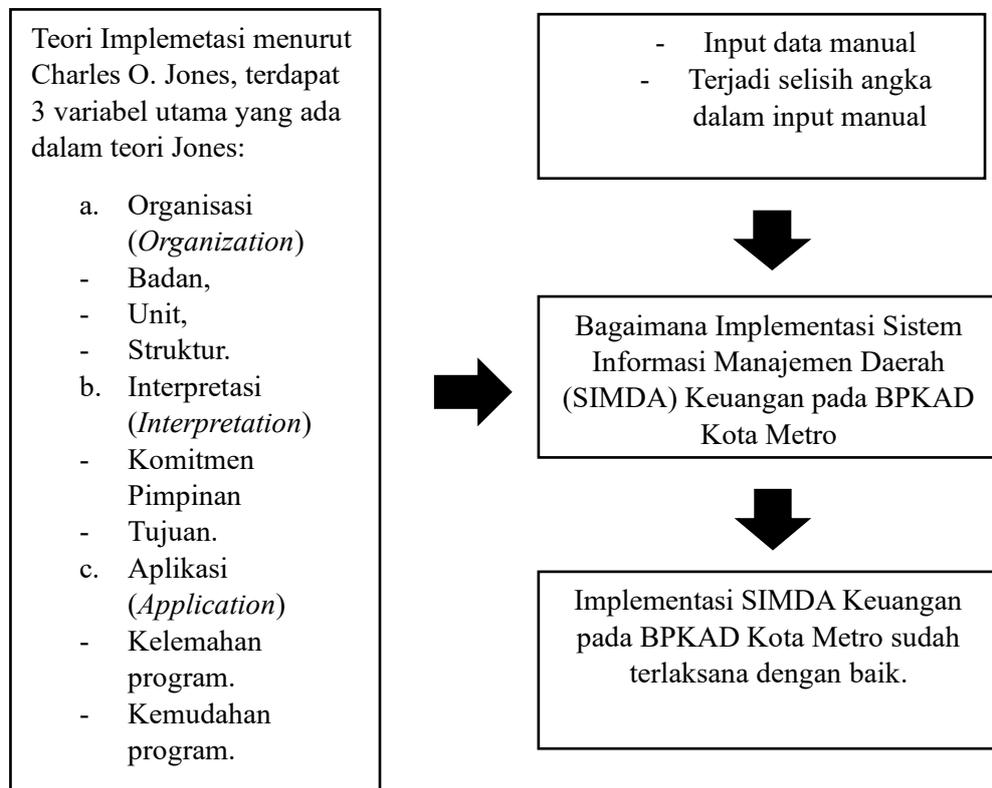
- b. Menyusun laporan keuangan menjadi lebih efisien dan tepat.
- c. Menyimpan data laporan keuangan guna keperluan manajemen lainnya.
- d. Menghasilkan informasi yang akurat secara efektif serta efisien yang nantinya digunakan oleh pengguna laporan.
- e. Mempermudah proses audit dalam merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing* (EDP) audit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Secara garis besar, kerangka pemikiran menjelaskan mengenai bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Metro. Terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu kendalanya penggunaan karena jaringan dan seringnya terjadi eror pada aplikasi dalam penggunaan. Penelitian ini menggunakan dasar teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang mengatakan keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh tiga variabel utama, yaitu, organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Berdasarkan variabel yang telah diuraikan, maka yang menjadi kerangka pemikiran tentang implementasi program aplikasi SIMDA pada BPKAD Kota Metro adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dalam memperoleh Kesimpulan berupa deskripsi data yang terperinci. Metode kualitatif adalah metode yang fokusnya pada pengamatan yang mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya penemuan-penemuan dan tidak dapat dicapai melalui prosedur-prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Murdiyanto, 2020), mengatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan cara penelitian yang hasilnya merupakan suatu data deskriptif yang berisi kata-kata tertulis atau lisan melalui narasumber dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif ini berbentuk deskriptif. Tipe deskriptif adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka (Moleong, 2021). Tipe deskriptif bertujuan menjawab isu-isu atau permasalahan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara, pengamatan langsung, dokumentasi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

Penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, baik itu fenomena ilmiah ataupun fenomena buatan, atau yang digunakan dalam menganalisis hasil subjek, tetapi tidak memberikan implikasi yang lebih luas (Adiputra *et al.*, (2021). Fenomena ini dapat berupa bentuk, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya. Berdasarkan pada penelitian ini, peneliti menjelaskan terkait bagaimana implementasi (SIMDA) Keuangan dan faktor penghambat yang dirasakan pada BPKAD Kota Metro dalam

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membuat pembatasan terkait objek penelitian yang diangkat agar tetap searah dengan tujuan awal dan tidak membahas permasalahan di luar konteks penelitian. Pembatasan dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Hal ini berfungsi agar membatasi penelitian dalam memilih atau mengumpulkan data yang relevan atau yang tidak relevan (Moleong, 2021). Fokus dari penelitian ini terdapat pada Implementasi SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Metro. Teori implementasi yang digunakan oleh peneliti adalah teori Charles O. Jones yang terdapat empat faktor dalam memberikan pengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- a. Organisasi (*Organization*)
 - Pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan aplikasi SIMDA Keuangan oleh pegawai atau atasan.
 - Struktur organisasi yang diperlukan dalam mengoperasikan suatu program atau aplikasi.
 - Pembagian kinerja sumber daya manusia yang kompeten.
- b. Interpretasi (*Interpretation*)
 - Kemampuan pelaksana atau tenaga kerja dalam menjalankan program atau aplikasi.
 - Komitmen pimpinan dalam penggunaan aplikasi dapat berjalan.
- c. Aplikasi (*Application*)
 - Penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dengan semestinya.
 - Efektivitas implementasi SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Metro.
 - Mengetahui faktor penghambat penggunaan SIMDA Keuangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian, lokasi penelitian yang akan dilakukan bertempat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Metro. Lokasi ini dipilih dikarenakan, penulis menemukan beberapa fenomena atau permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan di Lokasi tersebut. Selain itu, lokasi penelitian ini merupakan pusat pengelolaan keuangan di Kota Metro, sehingga penulis bisa mengidentifikasi fenomena yang ada, yang kemudian fenomena atau permasalahan tersebut penulis angkat dalam penelitian ini terkait Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro. Informan yang diwawancara adalah staff dari BPKAD Kota Metro.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan suatu fenomena atau masalah pertanyaan penelitian. Data yang disajikan berupa kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari atau mengetahui informasi yang berhubungan dengan objek penelitian berupa penjelasan pernyataan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Data primer yang didapatkan bersumber dari Lokasi penelitian melalui metode wawancara dan hasil observasi kepada informan serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditentukan dan menggunakan panduan wawancara dengan tujuan mengetahui bagaimana implementasi SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.
- b. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) merupakan Teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi untuk menemukan permasalahan atau fenomena yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal lainnya dari responden yang lebih merinci. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban dari responden dapat dicatat. Wawancara merupakan metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan adalah mendapatkan informasi data yang akurat dan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan atau narasumber. Alasan peneliti ingin wawancara dengan beberapa informan tersebut dikarenakan informan tersebut adalah pengguna SIMDA sehingga peneliti mengetahui bagaimana implementasi SIMDA di BPKAD Kota Metro.

Tabel 4. Wawancara Informan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Informan
1.	Jujuk Hariyanto, S.E	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda.	Informan pejabat yang bertanggungjawab terkait penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan di BPKAD Kota Metro
2.	Winarni, S.E.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Informan pejabat yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan
3.	Dedi Setiawan	Kasubbag. Kepegawaian dan Umum	
4.	Rifa Marheti, A.MD	Fungsional Umum.	Informan pegawai yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan
5.	Fiah Astarina, S.Pd	Ahli Pertama-Perencana	Informan pegawai yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan

6.	Sherly Putri Pertiwi, S.Kom	Pegawai Honorer	Informan pegawai yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan
7.	Vera Ariyanti, S.E	Pegawai Honorer	Informan pegawai yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan
8.	Cherly Marlina	Pegawai Honorer	Informan pegawai yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik jika dibandingkan dengan Teknik lainnya (Sugiyono, 2018:229). Observasi juga tidak hanya berpacu pada seseorang, tetapi pada objek-objek lainnya. Observasi menjadi salah satu Teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan dari penelitian, direncanakan serta dicatat dan dikontrol kendalanya (reliabilitas) dan validitasnya. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi atau penggunaan aplikasi SIMDA pada BPKAD Kota Metro.

Tabel 5. Gambaran Objek yang Diamati

No.	Objek yang diamati	Informasi
1.	Tampilan SIMDA Keuangan	Tampak depan aplikasi SIMDA Keuangan
2.	Operator penggunaan SIMDA Keuangan	Pengamatan terkait penggunaan SIMDA Keuangan

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3. Dokumentasi

Dokumentasi tertulis dan arsip adalah sumber data yang memiliki posisi penting dalam kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental

seseorang. Dokumentasi merupakan bahan kajian yang berbentuk tulisan, foto, atau hal-hal yang bisa dijadikan sumber kajian selain wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dari berbagai catatan yang sudah dilakukan di BPKAD kota Metro. Dokumentasi berupa pengumpulan informasi-informasi yang telah didapatkan melalui dokumentasi arsip atau gambar yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola dan informasi penting yang ada. Tujuannya adalah guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Analisis data merupakan proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, serta uraian dasar (Moleong, 2021).

Dalam pelaksanaan analisis data haruslah dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan, inipun harus dilakukan secara intensif agar data di lapangan terkumpul seluruhnya. Menurut Ulber Silalahi (2009:339), kegiatan dalam analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini yang akan digunakan peneliti, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang mana adalah proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, serta abstraksi data. Proses ini terjadi selama penelitian berlangsung.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian organisasi informasi deskripsi yang berbentuk narasi yang disimpulkan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara sistematis dan logis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah kesimpulan yang harus di verifikasi supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh (Moleong, 2021). Keabsahan data selain digunakan dalam penyanggahan balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak dapat pisah dari pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan guna membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Terdapat empat persyaratan atau kriteria keabsahan yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji *credibility* (kredibelitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti dalam memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan sebagai berikut.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas data. Melalui perpanjangan pengamatan berarti peneliti Kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terjalin sehingga mendapatkan informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

b. Meningkatkan Kecermatan Penelitian

Meningkatkan kecermatan secara berlanjuy maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat dengan baik. Meningkatkan kecermatan adalah suatu cara dalam mengontrol pekerjaan apakah data yang dikumpulkan sudah benar atau belum. Dalam meningkatkan ketekunan peneliti dapat melakukan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen terkait perbandingan hasil penelitian terdahulu.

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam kredibilitas dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan berbagai waktu.

- *Triangulasi Sumber.* Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
- *Triangulasi Teknik.* Untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- *Triangulasi Waktu.* Wawancara atau observasi yang dilakukan di berbagai waktu dan situasi yang berbeda.

2. *Transferability*

Pemeriksaan keteralihan data, pada penelitian ini dilakukan secara rinci yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks Lokasi penelitian dilakukan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa penelitian yang dilakukan menghasilkan hal yang sama. Pengujian ini dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor melakukan audit kepada keseluruhan aktivitas yang dilakukan peneliti dalam penelitian.

4. *Confirmability*

Penelitian dapat dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati lebih banyak orang. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar *confirmability*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran yang diberikan merupakan masukan yang dapat digunakan pihak terkait.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di BPKAD Kota Metro menunjukkan bahwa penerapannya dapat dikatakan tercapai. Berdasarkan teori Charles O. Jones, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pada indikator organisasi, struktur organisasi telah disusun dengan baik dan jelas sehingga memudahkan distribusi tugas, sumber daya manusia yang kompeten, dan sosialisasi yang telah disampaikan dengan baik kepada pegawai. Hal ini sejalan dengan teori Jones, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh struktur yang fungsional, SDM yang memadai, serta sosialisasi yang efektif. Dalam hal interpretasi, kemampuan pelaksana atau pegawai dapat memahami isi kebijakan dan mengimplementasikannya dan komitmen oleh pimpinan dalam memberi dorongan dan dukungan agar kebijakan dapat dijalankan sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan teori Jones yang menekankan bahwa pemahaman pelaksana dan dukungan pimpinan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada indikator aplikasi, penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan sudah digunakan semestinya dan aplikasi SIMDA Keuangan juga sudah cukup mudah digunakan, serta penggunaan aplikasi yang konsisten di seluruh bidang menunjukkan integrasi yang baik dalam operasional harian sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi SIMDA Keuangan sudah cukup efektif. Hal ini sejalan dengan teori Jones, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi tercermin dari pelaksanaan teknis yang sesuai pedoman serta konsistensi dan integrasi di lapangan.

2. Meskipun dalam implementasi kebijakan aplikasi SIMDA Keuangan ini berjalan dengan baik, tetapi tetap ada faktor penghambat yang memengaruhi dalam penerapannya. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pelatihan berkelanjutan atau pendampingan teknis sehingga beberapa pegawai terdapat kendala dalam melakukan pekerjaan sehingga menyebabkan efisiensi kinerja terhambat. Lalu, faktor infrastruktur teknologi yang kurang memadai juga menjadi salah satu faktor penghambat. Meskipun SIMDA Keuangan dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan, masalah seperti koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang usang sering kali mengganggu kelancaran operasional sistem. Selanjutnya, seperti kesalahan input data, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, menjadi tantangan tersendiri, terutama saat menyusun laporan keuangan. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya penerapan SIMDA di kalangan beberapa pihak terkait, turut menghambat implementasi. Kesalahan ini sering kali memerlukan konsultasi lanjutan dengan BPKP untuk perbaikannya. Perubahan anggaran yang terjadi di tengah tahun juga menjadi faktor penghambat karena membutuhkan penyesuaian ulang pada sistem. Hal ini sejalan dengan teori Charles O. Jones, yang menyatakan bahwa

keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada struktur, tetapi juga pada kesiapan teknis, kapasitas pelaksana, dan dukungan sistem yang memadai. Meskipun demikian, secara umum aplikasi SIMDA Keuangan dinilai mudah digunakan dan dapat berjalan dengan baik jika hambatan-hambatan tersebut dapat segera diatasi.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dihasilkan, peneliti memberikan saran terkait Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yaitu:

1. Kantor BPKAD Kota Metro perlu memperkuat koordinasi antar unit dan struktur kinerja lebih diperjelas lagi mengenai tupoksi antar bagian agar implementasi berjalan efektif.
2. Kantor BPKAD Kota Metro disarankan untuk melakukan peningkatan fasilitas pendukung, salah satunya terkait memastikan jaringan internet di lingkungan kantor dapat stabil sehingga tidak menghambat aktivitas bekerja.
3. Evaluasi berkala dan peningkatan teknis perlu dilakukan untuk memastikan SIMDA Keuangan mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
4. Kantor BPKAD Kota Metro perlu mengadakan sosialisasi kembali dengan OPD lainnya untuk memastikan bahwa OPD lain paham dan mengerti bagaimana penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan sehingga tidak terdapat kesalahan lainnya yang menghambat berjalannya kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra et al. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar. Penerbit Yayasan Kita Menulis
- Algipari et al., (2022). Pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Terhadap Performa Pegawai Pada Yogya Junction 8 Cemara. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis Volume 3 No.1*.
- Alhamdi, R. (2019). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Studi Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan*. Masters Thesis, Universitas Islam Riau.
- Ardianingsih, A., Setiawan, D. (2023). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ariska, C. Masniadi, R. Rachman, R. 2019. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan, Vol 2, No. (1)*.
- Astuti. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Budiman, F., Arza, F.I. (2013). Pendekatan Teknologi Acceptance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA, Vol. 1, No. (1)*.
- BPKP. (2008). *Kode Etik Dan Standar Audit (5th ed.)*. Bogor: Pusdiklat BPKP.
- BPKP. (2021). Laporan Evaluasi Implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Daerah. Jakarta: BPKP.
- BPKP. (2023).
- Cholid, N., Abu, A. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fatah, N. (2000). *landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- H. Malayu SP Hasibuan. (2010). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, Hlm 128.
- Haedar, A. (2010). Implementasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1*.

- Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. In B. Hartono, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Hertanto, Y., Domai, T., Amin, F. (2016). Penerapan System Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 1, No. (2).
- Hardjanto K. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajmene Daerah (SIMDA) Keuangan Berbasis Akrual Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang. *Jurnal Teknik Informatika*.
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Jogiyanto. (2005). *Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Edisi II, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Machmud. (2013). Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten Gowa. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*, Vol. 9, No. (3).
- Mahyadi. (2023). Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*, Vol. 2, No. (2).
- Maisyaroh. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. *PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4, No. (1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Marwiyah. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Moenek, R., Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, (2010). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Naditya. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.

- Nabilah, N., E. (2021). *Analisis Efektifitasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Oengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Naidah, Hj. 2009. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Metro Batavia Air Distrik Makassar, Balance. *Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Volume 1, No. (1)*.
- Nurlan, Darise. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta: Indeks.
- Nuzleha., Yamin, Y., Safitri, M. (2023). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Noeng, M. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: (Rakesarasin), hlm 2.
- Permatasari, K. (2015). Implementasi Kebijakan Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi. *Jurnal Bina Praja, Vol. 7, No. (4)*.
- Ponto, A., Pioh, N., Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi XX, Vol. 3*.
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*.
- Permatasari, K. I. (2015). Implementasi Kebijakan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi. *Jurnal Bina Praja, 7(2015), 319–325*.
- Pramono J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press
- Rahayu, S., Diana, Y. (2023). *Sistem Informasi Manajemen*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Robbins., Stephen., Coulter. (2007). *Manajemen < Edisi Kedelapan, Jilid 2*. Jakarta.
- Rochaety, E. (2017). *Sistem Informasi Manajemen* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Simamora, Desi. (2021). Implementasi sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. *Universitas Medan Area*
- Siregar, Z. M. (2017). Hubungan Sistem Informasi Manajemen Dengan Kinerja Karyawan BRI Cabang Rantauprapat. *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen), 4(1), 29-35*.

- Siregar, R., & Wulandari, E. (2019). Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SIMDA. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 8(1), 45–52.
- Simamora, D., Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahkroza, Akhmad. 2003. Best Practices Corporate Governance dalam Konteks Lokal Perbankan Indonesia. *Majalah Usahawan*.
- Syarifin, Pipin, Dedah. (2005). *Perimbangan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ulber Silalahi, (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Van Meter Van Horn. (1975). *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.
- Waluyo, (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju
- Wajong, S., Sambiran, S., Pangemanan, S. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. (1).
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Widodo, Joko. 2008. *Good Governance. Telaah dan Dimensi Akuntabilitas Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah Instan Cendikia*. Surabaya: Insan Cendikia
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan:

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah.

PP No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai pengganti PP No.11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Metro No. 1 tahun 2000 Rujukan Bentuk Kelembagaan Pemerintah Kota Metro.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Metro

Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.